



BUKU AJAR

MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT
SKS : 2 SKS
SEMESTER : GANJIL / GENAP
PROGRAM STUDI : S1 ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH :
BAMBANG DWI BASKORO, SH.MHUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur alhamdulillah yang tiada terkira besarnya kehadiran Allah SWT atas selesainya Buku Ajar untuk Mata Kuliah “HUKUM ACARA PIDANA LANJUT”. Tidak lupa bersamaan ini juga Penulis mohon maaf kepada Pimpinan Fakultas karena Buku Ajar ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena naskah asli yang sesungguhnya telah hilang entah dimana sampai hampir dua tahun. Sambil menunggu penyusunan ulang maka sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diemban Penulis membuat naskah baru ini.

Mudah-mudahan Buku Ajar ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang akan mempelajari Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Lanjut.

Tidak lupa pula Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dimana Penulis mendapatkan naungan dalam belajar dan bekerja.

Semarang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I BATASAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA LANJUT.....	1
BAB II PANDANGAN BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA	8
A. Pandangan Bangsa.....	8
B. Instrumen Nasional dan Instrumen Internasional	11
C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	14
BAB III BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENGADILAN HAM.....	25
A. Batasan-batasan dan Ruang Lingkup.....	25
B. Perbuatan/Tindak Pidana Dasar Peradilan.....	28
C. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan	32
BAB IV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN PADA PENGADILAN HAM	34
A. Penyelidikan dan Penyidikan	34
B. Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	38
C. Upaya-upaya Paksa	42
BAB V PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN SERTA KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI	44
A. Perlindungan Saksi dan Korban	44
B. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi	47
BAB VI MAKNA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ..	49
A. Kesejahteraan Anak	49
B. Perlindungan Anak	50
C. Undang-Undang Pengadilan Anak	55
D. Instrumen-instrumen dan Instrumen Internasional	59

BAB VII	PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG	
	PERKARA ANAK NAKAL	62
	A. Batasan dan Ruang Lingkup	62
	B. Penyidikan.....	63
	C. Penuntutan.....	64
	D. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	64
	E. Upaya-upaya Paksa	67
BAB VIII	HUKUM PENITENSIER ANAK.....	69
	A. Sanksi dan Pedoman Penjatuhan Sanksi	69
	B. Pemasyarakatan terhadap Anak	72
BAB IX	BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENGADILAN TIPIKOR	76
	A. Batasan dan Ruang Lingkup Tipikor	76
	B. Batasan dan Ruang Lingkup Pengadilan Tipikor	94
	C. Peran Serta Masyarakat.....	94
BAB X	PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG	
	PENGADILAN UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI.....	100
	A. Komisi Pemberantasan Korupsi	100
	B. Penyelidikan dan Penyidikan	109
	C. Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	111
BAB XI	UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA	
	TERORISME	113
	A. Batasan dan Ruang Lingkup	113
	B. Ketentuan-Ketentuan Hukum Acara Pidana yang	
	Bersifat Khusus	118
	C. Perlindungan Saksi, Korban, Penegak Hukum dan	
	Keluarga.....	120
	D. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	127

BAB I

BATASAN DAN RUANG LINGKUP

HUKUM ACARA PIDANA LANJUT

Apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana? Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa sarjana, sebagai berikut:

1. J de Bosch Kemper:

Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.¹

2. Simons:

Hukum Acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.²

3. Wirjono Prodjodikoro:

Hukum acara pidana ialah peraturan yang mengatur cara bagaimana badan pemerintah berhak menuntut jika terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman dapat dilaksanakan.³

4. Sudarto:

Hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.⁴

¹ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm.2.

² *Loc.Cit.*

³ *Loc.Cit.*

⁴ *Loc.Cit.*

5. A. Minkenhof:

Hukum acara pidana mempunyai peraturan mengenai yang terjadi antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁵

6. J.M. van Bemmelen:

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran undang-undang pidana:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.⁶

7. Moeljatno:

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁷

⁵ A. Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm.6.

⁶ *Ibid.* hlm.7.

⁷ H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.1.

8. Bambang Poernomo:

Pengertian hukum acara pidana ada tingkatan, yaitu:

1. Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.
2. Pengertian yang luas, diartikan bahwa disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekadar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.
3. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.⁸

Hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dianggap sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁹

Di dalam Pasal 103 KUHP dikatakan sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan

⁸ *Ibid.*, hlm.1-2.

⁹ Moeljatno, 2001, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.v.

perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”¹⁰

Ketentuan Pasal 103 KUHP tersebut memungkinkan Pembentuk Undang-Undang mengundang peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar kodifikasi hukum pidana (KUHP) sehingga kemudian memunculkan adanya:

1. Undang-Undang No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
3. Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; dan sebagainya.

Di dalam beberapa Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP terdapat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus yang merupakan penyimpangan dari asas-asas yang bersifat umum, seperti ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si tersangka dan kepentingan-kepentingan, yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka Jaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali yang tersebut Pasal 6 ayat (3), selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai, untuk memerintahkan kepada si tersangka sebagai tindakan sementara:

- a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si tersangka, di mana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan;

¹⁰ *Ibid.*, hlm.40.

- b. penempatan perusahaan si tersangka, di mana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, di bawah pengampuan;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada si tersangka berhubung dengan perusahaan itu;
- d. supaya si tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- e. supaya tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.”¹¹

Di dalam beberapa Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus yang merupakan penyimpangan dari asas-asas yang bersifat umum, seperti ketentuan mengenai sistem pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) yang merupakan penyimpangan atas asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*).¹²

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus di luar KUHP tersebut tetap berlaku sampai sekarang sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-

¹¹ .K. Wantjik Saleh, 1985, *Pelengkap KUH Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.16.

¹² .Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, hlm.8-9.

undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”¹³

Pasal 284 ayat (2) KUHAP mempunyai fungsi yang sama dengan Pasal 103 KUHP. Apabila Pasal 103 KUHP menjembatani hukum pidana kodifikasi dengan hukum pidana di luar kodifikasi, maka Pasal 284 ayat (1) KUHAP menjembatani hukum acara pidana kodifikasi dengan hukum acara pidana di luar kodifikasi.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikatakan sebagai berikut:

“Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan Undang-Undang.”¹⁴

Ketentuan tersebut di atas menjadi landasan dari diundangkannya beberapa Undang-Undang Hukum Acara Pidana Khusus, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hal Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian materi “HUKUM ACARA PIDANA LANJUT” terdiri dari:

¹³ Anonymus, 2007, *KUHAP Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.116.

¹⁴ Anonymus, Tanpa Tahun, *KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Karya Anda, hlm.275.

1. Pengadilan Anak sebagaimana diatur di dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya;
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) sebagaimana diatur di dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya;
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) sebagaimana diatur di dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti:
 - a. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB II

PANDANGAN BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A. PANDANGAN BANGSA

Atas dasar berbagai perspektif, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut :¹⁵

1. Berkaitan dengan sumbernya, dapat berupa :
 - a. Hak-hak alamiah (hak untuk hidup, martabat dan perkembangan pribadi)
 - b. Hak-hak konstitusional,
 - c. Hak-hak statutair,
 - d. Hak-hak yuridis.
2. Berkaitan dengan si penerima hak, dapat berupa :
 - a. Hak-Hak individual
 - b. Hak-Hak kolektif
3. Berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan, dapat berupa :
 - a. Hak-Hak sipil
 - b. Hak-Hak politik
 - c. Hak-Hak ekonomi
 - d. Hak-Hak sosial
 - e. Hak-Hak kultural
4. Berkaitan dengan tahapan perjuangannya, dapat berupa :
 - a. HAM generasi pertama, memiliki ciri-ciri bernuansakan hak-hak sipil dan politik sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Piagam HAM Universal PBB Tahun 1948.
 - b. HAM generasi kedua, memiliki ciri-ciri bernuansakan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural (tahun 1966).

¹⁵ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm.41-42 dan hlm.x-xi.

- c. HAM generasi ketiga, memiliki ciri-ciri bernuansakan hak-hak kolektif termasuk di dalamnya hak untuk pengembangan diri (tahun 1986).

Miriam Budiardjo: terdapat kritik dari negara-negara berkembang terhadap falsafah HAM yang dianut oleh negara-negara maju berkisar pada :¹⁶

1. HAM dalam Deklarasi HAM tahun 1948 berkesan tanpa batas sehingga hukum positif yang bersifat nasional kurang dihargai.
2. HAM ekonomi dan HAM pembangunan oleh negara maju terkesan kurang dipertimbangkan sebagai HAM, melainkan sebagai cita-cita semata-mata dan tidak sepenting hak politik.
3. Deklarasi HAM hanya merumuskan hak-hak individu dan melecehkan hak-hak kolektif (hak komunitas, hak keluarga dan hak-hak bangsa-bangsa)
4. Deklarasi HAM mengabaikan ciri khas setiap bangsa dan masyarakat (*national and regional particularities*) yang seharusnya memungkinkan pelaksanaan HAM berbeda di setiap negara.

Kekhasan ini menumbuhkan prinsip “relativitas kultural” atau “partikularistik relatif”.

Muladi : penilaian negara maju terhadap negara-negara berkembang tentang pelaksanaan HAM bersifat “*judgement*” (mengadili) dan seringkali mengaitkan dengan “*conditionalities*” (syarat-syarat tertentu yang melekat pada perdagangan dan bantuan ekonomi). Keberadaan Covenant tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dan Covenant tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kulutral Tahun 1966 serta hak pembangunan yang diperkuat Deklarasi Wina 1986 dapat dianggap sebagai perdamaian / kompromi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, antara negara-negara barat dengan negara-negara timur tentang HAM.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm.x-xi.

¹⁷ *Loc.Cit.*

Muladi : perpaduan antara 3 generasi HAM memunculkan permasalahan-permasalahan tentang interaksi antara hak-hak asasi man, dengan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia terus berkembang dalam kaitannya dengan betapa pentingnya peranan masyarakat pepaduan hubungan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan manusia.¹⁸

Pandangan yang berbeda-beda terhadap pemahaman HAM dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam pandangan sebagai berikut :

1. Pandangan Universal Absolut, yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam "*The International Bill of Human Rights*", Pandangan ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Pandangan ini dipandang eksploitatif sebab ia menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai.
2. Pandangan Universal Relatif, yang memandang permasalahan HAM sebagai masalah universal namun terdapat perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang tetap diakui keberadaannya.
3. Pandangan Partikularistik Absolut, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensif dan pasif tentang HAM.
4. Pandangan Partikularistik Relatif, yang melihat persoalan HAM sebagai masalah universal juga nasional dari masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm.xi.

sekedar defensif tapi juga aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik HAM yang dianutnya.¹⁹

Muladi : bangsa Indonesia menganut partikularistik relatif dengan berusaha untuk menemukan titik dialogis diantara 4 (empat) pandangan tersebut di atas atas dasar Pancasila dan UUD 1945 tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM. Ini sesuai dengan pandangan komprehensif integral yang kita anut atas dasar Asas Kekeluargaan yang harus mengacu pada pendekatan sistematis.²⁰

Meskipun UUD 1945 terlahir sebelum *Universal Declaration of Human Rights 1948* bukan berarti UUD 1945 mengabaikan HAM atau tidak mengatur HAM karena di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 : ditegaskan, bahwa Negara RI adalah suatu Negara Hukum yang berarti bahwa negara RI :

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala Warga Negeranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun.

B. INSTRUMEN NASIONAL DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL

Instrumen-instrumen Nasional

1. Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
2. UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. UU No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

¹⁹ .*Ibid.*, hlm.2-4.

²⁰ .*Ibid.*, hlm.4.

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
6. Keppres RI No.50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
7. Keppres RI No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
8. Keppres RI No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
9. Keppres RI No.53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Keppres RI No.96 Tahun 2001.
10. Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang Berat.
11. Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang Berat.
12. Inpres RI No.26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Instrumen-instrumen Internasional

Sepanjang menyangkut HAM di bidang administrasi peradilan pidana dapat diidentifikasi instrumen-instrumen internasional, sbb:

1. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.*
2. *Basic Principles for the Treatment of Prisoners.*
3. *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.*

4. *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.*
5. *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
6. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
7. *Principles of Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
8. *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty.*
9. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials.*
10. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.*
11. *Basic Principles on the Role of Lawyers.*
12. *Guidelines on the Role of Prosecutors.*
13. *UN Standards Minimum Rules for Non Custodial Measures (The Tokyo Rules).*
14. *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).*
15. *UN Standards Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).*
16. *Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*
17. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary.*
18. *Model Treaty on the Transfer of Proceeding in Criminal Matters.*
19. *Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released.*

*20. Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.*²¹

C. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Dibentuk berdasarkan Keppres Republik Indonesia No.50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kemudian setelah keluarnya Tap MPR RI NO.XVII/MPR RI/1998 tentang HAM disesuaikan dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Di dalam :

Pasal 105 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM (merupakan ketentuan peralihan). dikatakan :

Ayat (1) : segala ketentuan mengenai HAM yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-Undang ini.

Ayat (2) : a. Komnas HAM yang dibentuk berdasar Keppres No.50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut UU ini.

c. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasar UU ini.

Ayat (3) : dalam waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya UU ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan UU ini.

Menurut:

Pasal 76 ayat (3) dan (4) UU No.39 Tahun 1999 :

Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat didirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah.

Adapun:

²¹ *Ibid.*, hlm.43-44.

Tujuan Komnas HAM (Psl.75 UU No.39 Tahun 1999) :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM, dan
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Keanggotaan:

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia (Pasal 76 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999).

Persyaratan:

Pasal 84 UU No. 39 Tahun 1999 :

- a. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi org. atau kelompok yang dilanggar HAM-nya,
- b. Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara atau pengemban profesi hukum lainnya,
- c. Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif dan lembaga tinggi negara atau
- d. Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota LSM dan kalangan Perguruan Tinggi.

Hak dan Kewajiban

Setiap anggota KOMNAS HAM berkewajiban :

- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan KOMNAS HAM,
- b. Berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan KOMNAS HAM, dan

- c. Menjaga kerahasiaan ket. yang karena sifatnya merupakan rahasia KOMNAS HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota (Pasal 87 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999)

Setiap anggota KOMNAS HAM berhak :

- a. Menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang paripurna dan subkomisi,
- b. Memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang paripurna dan Subkomisi,
- c. Mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil Ketua KOMNAS HAM dalam sidang Paripurna, dan
- d. Mengajukan bakal calon anggota KOMNAS HAM dalam sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu (Pasal 87 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999)

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :

Untuk mencapai tujuannya KOMNAS HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Pasal 80 ayat (1) : Pelaksanaan kegiatan KOMNAS HAM dilakukan oleh subkomisi. Ketentuan mengenai subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib KOMNAS HAM (ayat(2) pasal tersebut), yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna (Pasal 79 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999). Sidang Paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KOMNAS HAM (Pasal 79 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Adapun Fungsi-fungsi itu sbb:

- 1. Fungsi Pengkajian dan Penelitian, KOMNAS HAM bertugas dan berwenang melakukan (Pasal 89 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM) :

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
 - b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
 - c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d. Melakukan studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai HAM;
 - e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM, dan
 - f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya baik tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
2. Fungsi Penyuluhan, KOMNAS HAM bertugas dan berwenang melakukan (Pasal 89 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM) :
- a. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
 - b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya, dan
 - c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
3. Fungsi Pemantauan, KOMNAS HAM bertugas dan berwenang melakukan (Pasal 89 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM) :
- a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

- b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “Penyelidikan dan pemeriksaan” dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.

- c. Pemanggilan pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksikannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan, dan
- h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terhadap pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh Pengadilan yang kemudian pendapat KOMNAS HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “pelanggaran HAM dalam masalah

publik” antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

4. Fungsi Mediasi, KOMNAS HAM bertugas dan berwenang melakukan (Psl. 89 ayat (4) UU No.39 Tahun 1999):

- a. Perdamaian kedua belah pihak;
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian perkara perdata diluar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak.

- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaian, dan
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Laporan Tahunan:

Pasal 97 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

KOMNAS HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya serta kondisi HAM dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Tata Cara Pelaporan / Pengaduan dan Mediasi :

1. Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan atau pengaduan lisan atau tertulis kepada KOMNAS HAM (Pasal 90 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999);

2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan bila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan (Pasal 90 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999);
3. Pengaduan yang dilakukan oleh pihak lain harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan KOMNAS HAM (Pasal 90 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999). Ketentuan ini meliputi pula pengaduan melalui perwakilan (*class action*) mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok masyarakat (Pasal 90 ayat (4) UU No.39 Tahun 1999).

Penjelasan Pasal 90 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pengaduan melalui perwakilan” adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan atau atas dasar kesamaan kepentingan hukumnya.

4. Pemeriksaan atas pengaduan kepada KOMNAS HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :
 - a. Tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM;
 - c. Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “itikad buruk” adalah perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik, misalnya pengaduan yang disertai data palsu atau keterangan tidak benar dan atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok dan atau masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan “tidak ada kesungguhan” adalah bahwa pengadu benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 3x dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.

- d. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, atau
- e. Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pelaksanaan kewenangan mengenai hal ini ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib KOMNAS HAM (Pasal 91 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM).

- 5. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada. KOMNAS HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan (Pasal 92 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999). KOMNAS HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh KOMNAS HAM yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan (ayat (2) pasal yang bersangkutan). Penetapan sebagaimana dimaksud dalam hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan ketentuan atau bukti lainnya tersebut dapat :

- a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
- b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
- c. membahayakan keselamatan perorangan;
- d. mencemarkan nama baik perorangan;

- e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib di rahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah.
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan suatu perkara pidana.
 - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau
 - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.
(Pasal.92 ayat (3) UU No.39 Tahun.1999)
6. Pemeriksaan pelanggaran HAM dilakukan secara tertutup kecuali ditentukan lain oleh KOMNAS HAM (Psl.93 UU No.39 Tahun 1999)
 7. Pihak pengadu, korban, saksi dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Psl.89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan KOMNAS HAM (Psl.94 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999). Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan (tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya) KOMNAS HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.(Psl.94 ayat (2) jo Psl.95 UU No.39 Tahun 1999).

Penjelasan Pasal 95 UU No.39 Tahun 1999 :

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaruhi (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura.

8. Pasal 96 UU No.39 Tahun 1999 :

Ayat (1) : penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b dilakukan oleh Anggota KOMNAS HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

Ayat (2) : penyelesaian yang dicapai dalam ayat (1) berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.

Ayat (3) : kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Penjelasan:

Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4) : bila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penjelasan:

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalui KOMNAS HAM. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan, maka Pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut. Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini

maka pihak ketiga tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

Ayat (5) : Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

BAB III
BATASAN DAN RUANG LINGKUP
PENGADILAN HAM

A. BATASAN – BATASAN DAN RUANG LINGKUP

Batasan-batasan

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap organisasi demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 butir / angka ke-1 UU No.26 Tahun 2000).
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 1 butir / angka ke-3 UU No.26 Tahun 2000)
3. Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 2 UU No.26 Tahun 2000)
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan diatur dalam UU ini (Pasal 1 butir 5 UU No.26 Tahun 2000).

Ruang Lingkup

Terdapat 2 macam Pengadilan HAM :

1. Pengadilan HAM Permanen
2. Pengadilan HAM Ad Hoc (Pasal 43 UU No.26 Tahun 2000)

Pasal 2 UU No.26 Tahun 2000 : Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 4 UU No.26 Tahun 2000 : Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 : Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6 UU No.26 Tahun 2000 : Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh seseorang dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Penjelasan :

merupakan kewenangan dari Pengadilan.²²

Pasal 49 UU No. 26 Tahun 2000

Ketentuan mengenai Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam Pasal 74 dan Pasal 123 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut UU ini.

Pasal 50 UU No.26 Tahun 2000

Perpu No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya

²² Merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan menggunakan prosedur Pengadilan Anak.

UU ini.²³

Pasal 43 UU No.26 Tahun 2000 :

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.
- (2) Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Kompetensi Relatif

Pasal 45 UU No.26 Tahun 2000 (merupakan ketentuan peralihan) :

1. Untuk pertama kali Pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar (lihat ayat (1) pasal tersebut).
2. Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di :
 - a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah DKI Jakarta, Prov., Jabar, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar dan Kal. Tengah.
 - b. Surabaya yang meliputi wilayah Prov. Jatim, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kal. Sel, Kaltim, NTB dan NTT.
 - c. Makasar yang meliputi wilayah Prov. Sulsel, Sultenggara, Sul.Tengah, Sulut, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.
 - d. Meliputi yang meliputi wilayah Prov. Sumut, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi dan Sumbar.

²³ Lembaga KKR serta UU yang mengaturnya (UU No.27 Tahun 2004) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi RI.

B. PERBUATAN / TINDAK PIDANA DASAR PERADILAN

Menurut:

Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 :

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. Kejahatan genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Adapun Perbuatan-perbuatan/Tindak Pidana yang Merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan HAM sbb:

1. Pasal 8 UU No.26 Tahun 2000:

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok ;
Penjelasan : yang dimaksud dengan “anggota kelompok” adalah seorang atau lebih anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 :

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Ps1.7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung tidak penduduk sipil, berupa:²⁴

a. Pembunuhan;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Psl. 340 KUHP.

b. Pemusnahan;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

c. Perbudakan;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa” adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional.

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

f. Penyiksaan ;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum,

²⁴ Dalam Penjelasan Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada dibawah pengawasan.

- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. Penghilangan orang secara paksa, atau

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “penghilangan orang secara paksa” yakni penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

- j. Kejahatan apartheid

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “kejahatan apartheid” adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

3. Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 26 Tahun 2000

a. Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000

Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

b. Pasal 42 ayat (2) UU No.26 Tahun 2000;

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

- a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

- b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
4. Percobaan, Permufakatan Jahat atau Pembantuan
Percobaan, permufakatan jahat atau pembantuan perbuatan dalam Pasal 8 atau Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.²⁵

C. SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN

Adapun Ancaman Pidana terhadap

Perbuatan yg Merupakan Pelanggaran HAM yang Berat

1. Pasal 36 UU No.26 Tahun 2000
Perbuatan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.
2. Pasal 37 UU No.26 Tahun 2000
Perbuatan dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.
3. Pasal 38 UU No.26 Tahun 2000
Perbuatan dalam Pasal 9 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling 15 tahun dan paling singkat 5 tahun.
4. Pasal 39 UU No.26 Tahun 2000
Perbuatan dalam Pasal 9 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun.

²⁵ Penjelasan Pasal 41 UU No.26 Tahun 2000 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

5. Pasal 40 UU No.26 Tahun 2000

Perbuatan dalam Pasal 9 huruf g, h, i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun.

6. Pasal 41 UU No.26 Tahun 2000 :

Percobaan, permufakatan jahat atau pembantuan perbuatan dalam Pasal 8 atau Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

7. Pasal 42 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 :

Perbuatan dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN
SIDANG PENGADILAN PADA PENGADILAN HAM

A. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Dalam Pasal 10 UU No.26 Tahun 2000 dikatakan :

“Dalam hal tidak ditentukan lain dalam UU ini, hukum acara atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”²⁶

Selanjutnya di dalam Pasal 48 UU No.26 Tahun 2000 dikatakan:

“Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.”

Penyelidikan

Dilakukan oleh KOMNAS HAM, yang dapat membentuk tim ad hoc penyelidik yang terdiri atas KOMNAS HAM dan unsur masyarakat (Pasal 18 UU No.26 Tahun 2000).

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia (Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU No.26 tahun 2000).

Dalam hal mulai melakukan penyelidikan “harus” memberitahukan kepada Penyidik (Pasal 19 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000).

Penjelasan:

Pelaksanaan “penyelidikan” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan KOMNAS HAM dalam lingkup Proyustisia.

²⁶ Maksud si pembuat undang-undang adalah UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada Penyidik (Pasal 20 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000) paling lambat 7 hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada Penyidik, KOMNAS HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada Penyidik (Pasal 20 ayat (2) UU No.26 Tahun 2000).

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tidak bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melanggar hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Penyelidik berwenang (Pasal 19 ayat (1) UU No.26/2000):

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;

Penjelasan : yang dimaksud dengan “menerima” adalah menerima, mendaftarkan dan mencatat laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.

- c. Memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta atau didengar keterangannya;
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;

- e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
 - g. Atas perintah Penyidik, dapat melakukan tindakan berupa :
 - 1. Pemeriksaan surat;
 - 2. Penggeledahan dan penyitaan;
 - 3. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - 4. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan
- Penjelasan : Yang dimaksud dengan “perintah penyidik” adalah perintah tertulis yang dikeluarkan penyidik atas permintaan penyidik dan penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan dari penyidik

Yang dimaksud dengan “penggeledahan” adalah meliputi penggeledahan badan dan atau rumah.

Kewenangan KOMNAS HAM sebagai Penyelidik juga diatur di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dimana KOMNAS HAM dalam menjalankan Fungsi Pemantauan diberikan kewenangan-kewenangan sebagai Penyelidik Non Proyustisia dan Penyelidik Proyustisia. Disamping itu juga terdapat di dalam KUHAP sebagai *lex generalis* hukum acara pidana.

Penyidikan

Dilakukan oleh Jaksa Agung, yang dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Penyidik Ad Hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 21 ayat (1) jo (3) UU No.26 Tahun 2000).

Penjelasan:

Yang dimaksud “unsur masyarakat” adalah terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti Perguruan Tinggi.

Adapun kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat Penyidik Ad Hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah dilakukannya penyidikan.

Apabila Penyidik berpendapat hasil penyelidikan kurang lengkap, maka Penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada Penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan. Penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut ²⁷(Pasal 20 ayat (3) UU No.26 Tahun 2000).

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah dilakukannya penyidikan.

Yang dimaksud dengan “kuranglengkap” adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan (Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU No.26/2000).

Penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan (Pasal 21 ayat (2) UU No.26 Tahun 2000). Dalam tindak pidana pelanggaran HAM yang berat lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dengan penyidikan tidak satu atap (tidak dilakukan oleh lembaga yang sama).

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal

²⁷ Tindakan Penyidik dalam hal demikian dapat dikatakan sebagai PRAPENYIDIKAN dan ketentuan ini dapat dikatakan sebagai ketentuan yang mengatur mengenai PRAPENYIDIKAN.

hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penyidik (Pasal 22 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daeah hukumnya untuk paling lama 90 hari (ayat (2) pasal yang bersangkutan). Bila jangka waktu tersebut habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM daerah hukum yang bersangkutan (ayat (3) pasal yang bersangkutan).

Dalam hal jangka waktu dalam Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3), dari hasil penyidikan “tidak diperoleh bukti yang cukup” maka wajib dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Jaksa Agung (Pasal 22 ayat (4) UU No.26 Tahun 2000).

Penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan bila ada alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan (lihat Pasal 22 ayat (5) UU No.26 Tahun 2000).

Dalam hal penghentian penyidikan tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga berhak mengajukan “praperadilan” kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 22 ayat (6) UU No.26 Tahun 2000)

B. PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung, yang dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No.26 Tahun 2000).

Penjelasan :

Penuntut Umum Ad Hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau Oditur di Peradilan Militer.

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima (Pasal 24 UU No.26 Tahun 2000).

KOMNAS HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 25 UU No.26 Tahun 2000).

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.26 Tahun 2000). Penjelasan Pasal 27 ayat (2) :Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumlah ganjil.

Hakim Ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua MA (Pasal 28 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000).

Penjelasan :

Hakim Ad hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Jumlah hakim Ad hoc di Pengadilan HAM sekurang-kurangnya 12 orang (Pasal 28 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000).

Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1x masa jabatan (ayat (3) dari pasal tersebut).

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lambat 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM (Pasal 31 UU No.26 Tahun 2000).

Dalam hal perkara dimohonkan banding, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 32 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000). Pemeriksaan perkara di Tingkat banding dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc (ayat (2) pasal tersebut). Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sekurang-kurangnya 12 orang (ayat (3) pasal tersebut).

Di dalam Pasal 32 ayat (4) UU No.26 Tahun 2000 dikatakan: Ketentuan dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), Pasal 29, Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pemeriksaan perkara di tingkat kasasi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke MA (Pasal 33 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000). Pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim agung dan 3 orang hakim ad hoc (ayat (2) dari pasal tersebut). Hakim ad hoc di MA sekurang-kurangnya 3 orang (ayat (3) dari pasal tersebut). Hakim ad hoc di MA diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan DPR Republik Indonesia dengan masa jabatan selama 5 th (Pasal 33 ayat (4) dan (5) UU No.26 Tahun 2000).

Persyaratan Penyidik / PU / Hakim Ad Hoc

Pasal 21 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2000 :

Untuk dapat diangkat menjadi Penyidik Ad Hoc harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Berumur minimal 40 tahun dan maks. 65 tahun;
- c. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Penjelasan Pasal 29 angka 4 UU No.26 Tahun 2000.

Yang dimaksud dengan keahlian di bidang hukum adalah antara lain : Sarjana Syariah atau Sarjana Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Pasal 23 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2000 :

Untuk dapat diangkat menjadi Penuntut Umum Ad Hoc harus memenuhi syarat :

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Berumur minimal 40 tahun dan maks. 65 tahun;
3. Berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
6. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, dan
7. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) :

Penuntut Umum Ad Hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.

Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2000 :

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat :

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur min. 45 tahun dan maks. 65 tahun;
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
7. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, dan
8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Ketentuan ini berlaku untuk Hakim Ad Hoc di Pengadilan HAM dan Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tinggi.

Pasal 33 ayat (6) UU No.26 Tahun 2000:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur minimal 50 tahun;
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
7. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, dan
8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia

C. UPAYA – UPAYA PAKSA

Penangkapan

Penangkapan (Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2000)

Ayat (1) : Jaksa Agung berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Ayat (2) : Penyidik memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersebut dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta Uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

Ayat (3) : tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Ayat (4) : dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

Penahanan

Masa Penahanan dalam Perk. Pelanggaran HAM yang berat :

No	Pejabat yang berwenang	Lama penahanan/Pasal dari UU No.26 Tahun 2000	Lama Penahanan/ Psl 26/2000 Ijin dari	Lama Perpanjangan Penahanan/Psl dari UU No.26 Tahun 2000
1	Jaksa penyidik	90 hr/Psl.13 ayat (1)	90 hr/Ketua Peng. HAM/Psl.13 ayat (2)	60 hr/Ketua Peng. HAM / Psl 13 ayat (3)
2	Jaksa Penuntut Umum	30 hr/Psl.14 ayat (1)	20 hr/Ketua Peng. HAM/Psl.14 ayat (2)	20 hr/Ketua Peng. HAM/Psl 14 ayat (3)
3	Hakim Peng. HAM	90 hr/Psl. 15 ayat (1)	30 hr/Ketua Peng. HAM/Psl.15 ayat (2)	60 hr/Psl.1
4	Hakim Peng. Tinggi	60 hr / Ps.16 ayat (1)	30 hr/Ketua Peng. Tinggi Psl 16 ayat (2)	
5	Hakim Agung	60 hr/Psl.17 ayat (1)	30 hr/Ketua MA/Psl.17 ayat (2)	

BAB V
PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN
SERTA KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI

A.PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Dalam Pasal 34 UU No.26 Tahun 2000 dikatakan:

Ayat (1) : setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik & mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Ayat (2) : perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-cuma.

Ayat (3) : diatur lebih lanjut di dalam PP

Di dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang Berat diberikan.

Batasan-batasan (Pasal 1 PP No. 2 Tahun 2000) :

- a. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan atau Pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.
- c. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran ham yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

- d. Ancaman, gangguan, teror dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) PP No.2 Tahun 2002 dikatakan:

Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan :

Yang dimaksud “pemeriksaan di sidang pengadilan” adalah proses pemeriksaan pada sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau MA.

Bentuk Perlindungan

Bentuk-bentuk perlindungan meliputi (Pasal 4 PP No.2 Tahun 2002):

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengakuan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata Cara Permohonan dan Pemberian Perlindungan

Dalam Pasal 5 PP No.2 Tahun 2002 dikatakan::

Ayat (1) : perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :

- a. inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan atau
- b. permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan inisiatif aparat penegak hukum atau aparat keamanan adalah tindakan perlindungan yang langsung diberikan berdasarkan pertimbangan aparat bahwa korban dan saksi perlu segera dilindungi.

Inisiatif tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat.

Ayat (2) : permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, disampaikan kepada :

- a. Komnas HAM, pada tahap Penyelidikan;
- b. Kejaksaan, pada tahap Penyidikan dan Penuntutan;
- c. Pengadilan, pada tahap Pemeriksaan.

Penjelasan : perlindungan yang diajukan pada tahap tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut sekaligus merupakan permohonan untuk tahap berikutnya.

Ayat (3) : permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti.

Ayat (4) : permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 PP No. 2 Tahun 2002 :

Setelah menerima permohonan, aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan :

- a. klarifikasi atas kebenaran permohonan dan
- b. identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan

Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan (Pasal 7 PP No. 2 Tahun 2002) apabila :

- a. atas permohonan yang bersangkutan;

- b. korban dan atau saksi meninggal dunia, atau
- c. berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi (Ayat (1) pasal tersebut).

Ayat (2) : penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 hari sebelum perlindungan dihentikan.

Pasal 8 ayat (2) PP No. Tahun 2002 : segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan terhadap korban dan saksi dibebankan pada anggaran masing-masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan.

B. KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI

Dalam Pasal 35 UU No.26 Tahun 2000 dikatakan :

Ayat (1) : setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Ayat (2) : kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 :

- ✓ Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
- ✓ Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restitusi dapat berupa :

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau

c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

- ✓ Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

Ayat (3) : diatur lebih lanjut di dalam PP

PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang berat.

BAB VI

MAKNA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. KESEJAHTERAAN ANAK

Di dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak diberikan batasan-batasan, sebagai berikut :

1. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 1 butir 1 huruf a).
2. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 butir 1 huruf b).
3. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

Penjelasan Pasal 1 butir 2 :

Batas umur 21 th ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”

4. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah & ibu kandungnya (Pasal 1 butir 5)
5. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar (Pasal 1 butir 6)

6. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 1 butir 7)
7. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat (Pasal 1 butir 8).
8. Anak cacat adalah yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 1 butir 9).

Pengaturan usaha kesejahteraan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah :

Pasal 1 butir 1 menyatakan : Anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.

B.PERLINDUNGAN ANAK

Batasan-batasan

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diberikan batasan-batasan, sbb:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir ke-1)
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin & hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat & martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan di kriminasi (Pasal 1 butir ke-2)

3. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekuasaan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 1 butir ke-15).
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 butir ke-12).
5. Dst.

Asas, Landasan, Prinsip – Prinsip Dasar

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

Tujuan Perlindungan Anak

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang & berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002)

Hak-Hak Anak

dalam Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 Tahun 2002

antara lain :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat & martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002).
2. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan;
 - f. perlakuan salah lainnya (Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf f : tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak, selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan).
3. hak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002)
4. hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002)
5. hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002)
6. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002)

7. anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi & penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No.23 Tahun 2002 : bantuan lainnya misal : bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikologi atau psikiater, bantuan dari ahli bahasa)
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
8. anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002)
9. anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Penjelasan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 bantuan lainnya, misal : bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, pendidikan)
10. dst

Kewajiban anak terdapat dalam Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002

Kewajiban dan Tanggung jawab Penyelenggaraan :

Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002).

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia

1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan

penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak (Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2002)

Perlindungan Khusus kepada Anak

1. Anak dalam situasi darurat :
 - a. anak yang menjadi pengungsi
 - b. anak korban kerusuhan
 - c. anak korban bencana alam
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan fisik dan / atau mental
9. Anak yang menyandang cacat
10. Anak korban perlakuan salah atau penelantaran

Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
3. penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

C. UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK

Aspek Kebijakan Publik

Permasalahan publik yang diangkat dan diformulasikan dalam bentuk kebijakan publik dalam UU No. 3 Tahun 1997 :

Permasalahan yang berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan pidana yang harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa.²⁸

Kelompok Sasaran

Anak khususnya ANAK NAKAL

Yang dimaksud dengan anak nakal :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Pasal 1 angka ke-2 UU Pengadilan Anak).

²⁸ .Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm.73.

Batasan Usia

Batasan usia Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah:

1. Sekurang-kurangnya umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 dan belum pernah kawin, atau
2. Pada saat diajukan ke sidang anak telah melampaui umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan Anak)

Terhadap anak yang belum berumur 8 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Dari hasil Penyelidikan tersebut :

1. Apabila Penyidik berpendapat anak masih dapat dibina orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka anak tersebut diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
2. Apabila Penyidik berpendapat anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka anak tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997).

Kebijakan publik yang ada di dalam UU No.3 Tahun 1997:

1. Bersifat dinamis;
2. tercakup komponen beragam;
3. tercakup peran masing-masing sub struktur yang berbeda;
4. Bersifat memutuskan;
5. sebagai pedoman umum;
6. Untuk mengambil tindakan;
7. diarahkan pada masa depan;
8. Terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah;
9. Secara formal untuk mencapai suatu tujuan (lihat Konsiderans dan Penjelasan Umum dari UU No. 3 Tahun 1997).

10. Diarahkan untuk kepentingan umum
11. Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin
12. Bersifat kompleks.²⁹

Latar Belakang Munculnya

KONSIDERANS

UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

1. Untuk memberikan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang kepada anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu SDM yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.
2. Perlu adanya dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.
3. Untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan, bahwa pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan peradilan umum dengan dasar UU.³⁰

²⁹ .*Ibid.*, hlm.74-75.

³⁰ .*Ibid.*, hlm.76-77 dan 89-90.

PENJELASAN UMUM
UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Latar Belakang / Tujuan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1997 :

1. Untuk menghadapi permasalahan dan tantangan anak dalam masyarakat dengan adanya berbagai faktor yang berdampak negatif pada perkembangan anak yang berakibat anak melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melanggar hukum seperti :
 - a. Perkembangan pembangunan yang cepat;
 - b. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi;
 - c. Kemajuan ilmu pengetahuan;
 - d. Perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - e. Tidak memperoleh kesempatan mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial sehingga secara sengaja atau tidak sengaja sering melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.
 - f. Tidak atau kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh sehingga mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.
2. adalah merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat sekelilingnya terhadap pembinaan, pendidikan, pengembangan perilaku anak.
3. adalah merupakan kebijakan untuk melakukan differensiasi / spesialisasi terhadap sidang anak dengan maksud :
 - a. Untuk memberi kesempatan kepada anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara sehat dan wajar

sehingga perlu diadakan pemisahan dengan pelaku orang dewasa.

- b. Untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai Warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.³¹

D. INSTRUMEN NASIONAL DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL

Instrumen-instrumen Nasional

- 1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 5. UU No.20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
- 6. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 7. Keppres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan "*Convention On The Rights of The Child*" (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- 8. Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- 9. Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

³¹ .*Ibid.*, hlm.90-91.

10. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*"Trafficking"*) Perempuan dan Anak.
11. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
12. PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Instrumen-instrumen Internasional

1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1942 yang dikukuhkan dalam Resolusi MU – PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 Nopember 1959 tentang *"Declaration of The Rights of The Child"*
2. Resolusi MU – PBB No. 40/33 tanggal 29 Nopember 1985 tentang *"United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice" / "The Beijing Rules"*.
3. Resolusi MU – PBB No.40/35 tanggal 29 Nopember 1985 tentang *"The Prevention of Juvenile Delinquency"*
4. Resolusi MU – PBB No. 41/85 tentang *"Declaration on Social and Legal Principles Relating to The Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally"* (tgl. 3 Desember 1986).
5. Resolusi MU – PBB No.43/121 tgl. 8 Desember 1988 tentang *"Use of Children In The Illicit Traffic In Narcotict Drugs"*
6. Resolusi MU – PBB No.44/25 tgl. 20 Nopember 1989 tentang *"Convention on The Rights of The Child"*.
7. Ecosoc PBB 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 tentang *"The Prevention of Drugs Consumption Among Young Persons"*
8. Resolusi MU – PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990 tentang *"United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency" / "The Riyadh Guidelines"*
9. Resolusi MU – PBB No.45/113 tgl. 14 Desember 1990 tentang *"United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty"*.

10. Resolusi MU – PBB No.45/115 tgl. 14 Desember 1990 tentang “*The Instrumental Use of Children In Criminal Activities.*”
11. Resolusi Komisi HAM – PBB (*Commission On Human Rights*) 1993/80 tgl. 10 Maret 1993 tentang “*The Application of International Standards Concerning The Human Rights of Detained Juveniles.*”
12. Resolusi Komisi HAM – PBB 1994/90 tgl. 9 Maret 1994 tentang “*The Need To Adopt Effective International Measures for The Prevention and Eradication of The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.*”
13. Resolusi Komisi HAM – PBB 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 tentang “*The Special Rapporteur On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.*”
14. Resolusi Komisi HAM – PBB 1994/93 tgl. 9 Maret 1994 tentang “*The Flight of Street Children.*”
15. Resolusi Komisi HAM – PBB 1994/93 tgl. 9 Maret 1994 tentang “*The Effects of Armed Conflicts On Children’s Lives.*”
16. Kongres PBB Ke-IX Tahun 1995 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*”, diajukan 2 resolusi :
 - a. *Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice.*
 - b. *Elimination of Violence Against Children.*³²

³². Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.153-155.

BAB VII
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG
PERKARA ANAK NAKAL

A. BATASAN DAN RUANG LINGKUP

Landasan Hukum antara lain:

1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang KPKK sebagaimana ditambah dan dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1970 tentang KPKK jo Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pidana Penitensier khusus untuk Anak.

Batasan/Ruang Lingkup :

Yang dimaksud dengan **Anak Nakal** :

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (pasal 1 angka 2 UU No.3 Tahun 1997).

Batasan Usia Sidang Anak

Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak :

1. Sekurang-kurangnya umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, atau
2. Pada saat diajukan ke Sidang Anak telah melampaui umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997).

Ketentuan Diversi

Terhadap anak yang belum berumur 8 tahun yang melakukan atau duga melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

Dari hasil penyidikan tersebut :

1. apabila Penyidik berpendapat anak masih dapat dibina orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka anak tersebut diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
2. apabila Penyidik berpendapat anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka anak tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 5 UU No.3 Tahun 1997)

B. PENYIDIKAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik dalam perkara anak nakal harus memenuhi syarat :

- a. telah berpengalaman sebagai Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua dewasa
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi & memahami masalah anak (Pasal 41 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997)

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997)

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997).

Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997)

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri (Pasal 41 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997)

C. PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Pasal 53 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

Untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum dalam perkara anak nakal harus memenuhi syarat :

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan orang dewasa;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak (Pasal 53 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997)

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 UU No.3 Tahun 1997). Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan (Pasal 12 UU No.3 Tahun 1997). Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA (Pasal 16 UU No.3 Tahun 1997).

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama, banding atau kasasi adalah hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997). Dalam hal tertentu dan dipandang perlu Ketua PN/Ketua PT/Ketua MA dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis (Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997:

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak ybs lebih dari 5 tahun dan sulit pembuktiannya.

Sebelum sidang secara resmi dibuka hakim/majelis hakim dapat meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tentang anak yang bersangkutan yang meliputi :

- a. data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak, dan
- b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasayrakatan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal yang bersangkutan dari UU No. 3 Tahun 1997).

Hakim/Majelis Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup (Pasal 8 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997) dan dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak dapat dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 8 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 :

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Hakim/Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum (Pasal 57 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997)

Terdakwa dipanggil masuk beserta Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

Penasihat Hukum untuk perkara anak bersifat “wajib” (Pasal 55 UU No.3 Tahun 1997) tapi dalam Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 merupakan “hak”.

Selama persidangan Terdakwa didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997). Saat pemeriksaan saksi Hakim/Majelis. Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke luar ruang sidang (Pasal 58 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997). Orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap berada di dalam ruang sidang (Pasal 58 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).

Sebelum putusan diucapkan Hakim/Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak (Pasal 59 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997).

Putusan Pengadilan “wajib” mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 59 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).

Penjelasan Pasal 59 ayat (2) :

Tidak dipenuhinya ketentuan ini berakibat putusan batal demi hukum.

Putusan Pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 59 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

Pasal 8 ayat (5) UU No.3 Tahun 1997

“Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya”.

D. UPAYA-UPAYA PAKSA

Penahanan

Masa Penahanan, Penahanan Lanjutan dan Perpanjangan Penahanan

Dalam Perkara Anak Nakal

Pejabat Yang Berwenang	Lama Penahanan/Pasal dari UU No.3 Th 1997	Lama Penahanan Lanjutan/Ijin dari /Pasal dari UU No. 3 Th 1997	Lama Perpanjangan Penahanan/Ijin dari/Pasal dari UU No.3 Th 1997
Penyidik	20 hr/Pasal 44 ayat (1) jo (2)	10hr/Penuntut Umum/Pasal 44 ayat (3)	2x15hr/Ketua PN Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)
Penuntut Umum	10hr/Pasal 46 ayat (1) jo (2)	15hr/Ketua PN/Pasal 46 ayat (3)	2x15 hr/Ketua PN/Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)
Hakim PN	15hr/Pasal 47 ayat (1) jo (2)	30hr/Ketua PN/Pasal 47 ayat (3)	2X15hr/Ketua PT/Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)
Hakim Banding/Hakim PT	15hr/Psl 48 ayat (1) jo (2)	30hr/Ketua PT/Pasal 48 ayat (3)	2x15hr/Ketua MA/Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)
Hakim Kasasi/Hakim Agung	25hr/Pasal 49 ayat (1) jo (2)	30hr/Ketua MA/Pasal 49 ayat (3)	2x15hr/Ketua MA/Pasal 50 ayat (1) jo (2) jo (3)

- Penahanan dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter (Pasal 50 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997)
- Terhadap perpanjangan penahanan tersebut Tersangka/Terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :
 1. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan
 2. Ketua Ma dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negara dan Pemeriksaan Banding
- Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat (Pasal 45 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997)
- Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997)
- Selama dalam tahanan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45 ayat (4) UU No.3 Tahun 1997).

NOTES :

1. pemisahan perkara dalam hal anak-anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa dalam hal terjadi suatu “penyertaan” (Pasal 7 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997). Atau dalam hal terjadi suatu “koneksitas” (Pasal 7 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).
2. masalah Penangguhan penahanan?

BAB VIII

HUKUM PENITENSIER TERHADAP ANAK

A.SANKSI DAN PEDOMAN PENJATUHAN SANKSI

Adapun Sanksi yang dapat dijatuhkan, sbb:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan dapat berupa :
 - a. Pidana Pokok yang dapat berupa : (Pasal 23 ayat (2) UU no.3 Tahun 1997
 - 1) pidana penjara;
 - 2) pidana kurungan;
 - 3) pidana denda, atau
 - 4) pidana pengawasan, dan
 - b. Pidana Tambahan yang dapat berupa : (Pasal 23 (3) UU No.3 Tahun 1997
 - 1) perampasan barang-barang tertentu dan atau
 - 2) pembayaran ganti rugi.
2. Tindakan yang dapat dijatuhkan dapat berupa :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (lihat Pasal 24 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997).

Tindakan tersebut diatas dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (lihat pada ayat (2)nya).

Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No.3/1997 :

Yang dimaksud dengan “teguran” adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua

asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Yang dimaksud dengan “syarat tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Pedoman Penjatuhan Sanksi, sbb:

- ❖ Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, hakim menjatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana tersebut di atas (Pasal 25 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997). Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana tersebut di atas (Pasal 25 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997).
- ❖ Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 Tahun (Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997).
- ❖ Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berbunyi : menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan bukan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No.3 Tahun 1997 (Pasal 26 ayat (4) UU No.3 Tahun 1997).

- ❖ Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997).
- ❖ Pidana Kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27 UU No.3 Tahun 1997).
- ❖ Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat (1), (2) UU No.3 Tahun 1997). Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997).
- ❖ Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus (Pasal 29 ayat (1), (2) UU No.3 Tahun 1997).
 Ayat (3) : syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat
 Ayat (4) : syarat khusus : ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
 Ayat (5) : masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Ayat (6) : jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 tahun.

Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan (Pasal 29 ayat (8) UU No. 3 Tahun 1997). Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan. (Pasal 29 ayat (7) UU No.3 Tahun 1997).

- ❖ Pidana Pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun (Pasal 30 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997)

Ayat (2) : anak yang bersangkutan ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (3) : akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

B. PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK

Landasan Hukum

1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Batasan-batasan

(Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1995)

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (butir ke-1)
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

- pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (butir ke-2)
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan (butir ke-5).
 4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (butir ke-3)
 5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (butir ke-4).
 6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (butir ke-7).
 7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun (butir ke-8).
 8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (butir ke-9).
 9. Pasal 6 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 39 UU No.12 Tahun 1995.

Menyatakan :

Klien Pemasyarakatan atau klien terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas,
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak Negara yang berdasarkan Kepala Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 45 UU No. 12 Tahun 1995 :

Ayat (1) : Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

1. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya (ayat (3) dari pasal tersebut)

Tugas :

- a. memberi saran, dan atau
 - b. memberi pertimbangan kepada Menteri (ayat (2) dari pasal tersebut)
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya, bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan,

- b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan,
- c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan (ayat (4) dari pasal tersebut)

Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

- a. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS
Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Pasal 60 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997)
- b. Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di LAPAS
Anak dan telah mencapai umur 18 tapi belum mencapai umur 21 tahun dipindahkan ke LAPAS dan ditempatkan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 tahun atau lebih (Pasal 61 ayat (1) jo (2) UU No.3 Tahun 1997).
- c. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik (Pasal 62 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997). Pada ayat (5), (2)- nya dinyatakan :
Anak Pidana tersebut berada dibawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan serta dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan dan diamati oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- d. Pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan siswa pidana harus dijalankannya (Pasal 62 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997).
Pembebasan bersyarat ditentukan dengan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (3) Pasal (4) UU No.3 Tahun 1997.

BAB IX

BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENGADILAN TIPIKOR

A.BATASAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KORUPSI

Skema Pemberantasan TP Korupsi:

Perpu No.24 Th 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan
Tindak Pidana Korupsi



UU No.5 Tahun 1969



UU No.24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan
Tindak Pidana Korupsi



UU No.3 Th. 1971 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tap. MPR No.XI/MPR/1998 ttg Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



UU No.28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

PP No. 65 Th. 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan
Penyelenggara Negara;

PP No. 66 Th. 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa;

PP No. 67 Th. 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa;

PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

Keppres No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara.



Pasal 43 UU No.31 Th 1999 tentang Pemberantasan TP Korupsi

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, Pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan UU.



UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAIN YG BERKAITAN DENGAN TP KORUPSI

DALAM UU NO.3 TAHUN 1971

TINDAK PIDANA KORUPSI

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

- (1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara;
- c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP;
- d. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negara, seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

Pasal 209 ayat (1) KUHP : diancam dengan

Ke-1. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Ke-2. barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 210 ayat (1) KUHP : Diancam dengan;

Ke-1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Ke-2. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan UU ditentukan menjadi penasehat atau adviseer untuk menghadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Ayat (2) : Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemidanaan;.....

Pasal 387 KUHP : (1). Diancam dengan, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

(2). Diancam dengan, barangsiapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Pasal 388 KUHP : (1). Barangsiapa pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan AL atau AD, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan

(2). Diancam dengan, barangsiapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Pasal 415 KUHP : Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan.

Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan

Pasal 416 KUHP : Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan

Pasal 417 KUHP : Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu; atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan

Pasal 418 KUHP : Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya

Harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan

Pasal 419 KUHP : Diancam dengan, seorang pejabat :

Ke-1. yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ke-2. yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420 KUHP : (1). Diancam dengan :

Ke-1. seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.

Ke-2. barangsiapa yang menurut ketentuan UU ditunjuk menjadi penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

(2). Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana

Pasal 423 KUHP : Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan

Pasal 425 KUHP : Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana

Ke-1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum padahal diketahui bahwa tidak demikian adanya;

Ke-2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa tidak demikian halnya.

Ke-3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 435 KUHP : seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan (leverantien) atau persewaan (verpachtingen), yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian, dia ditugasi Mengurusi atau mengawasinya, diancam dengan

e. barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

(2). Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1)a, b, c, d, e Pasal ini. (Pasal 1 UU No.3 Tahun 1971).

Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971 : Pegawai Negeri yang dimaksud oleh UU ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

TINDAK-TINDAK PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN TP. KORUPSI:

1. Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman (Pasal 29 UU No.3 Tahun 1971).
2. Barangsiapa yang menurut Pasal 6,7,8,9,18,20,21, dan 22 UU ini wajib memberi keterangan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan (Pasal 30 UU No.3 Tahun 1971).
3. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan termaksud Pasal 10 dan 19 UU ini diancam dengan (Pasal 31 UU No.3 Tahun 1971).

DALAM UU NO.31 TAHUN 1999
PERBUATAN-PERBUATAN
YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan (Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999).
- b. Perbuatan diatas bila dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati (Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999).
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 :
“melawan hukum” dalam arti formil maupun dalam arti materiil.
“dapat merugikan” menunjukkan delik formil.
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 : Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu

apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindakan pidana korupsi.

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999)

3. a) Dipidana dengan setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).
- b) Bagi pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(Pasal 5 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).
Ketentuan ini mengacu pada Pasal 209 KUHP.

4. a) Dipidana dengan setiap orang yang :
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perUUan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)
- b) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).
- b) Bagi pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberian atau jani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (Pasal 5 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Th 2001).
Ketentuan ini mengacu pada Pasal 209 KUHP.
4. a) Dipidana dengan setiap orang yang :
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perUUan ditentukan menjadia

advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).

- b) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Th. 2001).

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 210 KUHP.

5. a) Dipidana dengan :
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c

(Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)

- b) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(Pasal 7 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP.

- 6. Dipidana dengan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2002).

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 415 KUHP.

- 7. Dipidana dengan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).
Ketentuan ini mengacu pada Pasal 416 KUHP.

- 8. Dipidana dengan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja:
 - a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Th 2001).

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 417 KUHP.

- 9. Dipidana dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001). Ketentuan ini mengacu pada Pasal 418 KUHP.

- 10. Dipidana dengan :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perUUan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau tidak mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negara atau Penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negara atau Penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negara atau Penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa kas tersebut bukan merupakan hutang;
- g. pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;
- h. pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perUUan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perUUan; atau

- i. pegawai negeri atau Penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).
- 11. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negara dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan (Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999).
- 12. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999)
- 13. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 s/d pasal 14 (Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999).
- 14. Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 s/d pasal 14 (Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999).

PERBUATAN-PERBUATAN

YANG MERUPAKAN TINDAK-TINDAK PIDANA LAIN

YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- 1. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan (Pasal 21 UU No.31/1999).

2. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan (Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999).

Pasal 28 UU No.31 Tahun 1999 :

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”

Pasal 29 UU No.31 Tahun 1999 :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perUUan yang berlaku.

Pasal 35 UU No.31 Tahun 1999 :

- (1) setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa

Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 :

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia”.

Penjelasan pasal 36 : petugas Agama Katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan yang dipercayakan menyimpan rahasia.

3. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP, dipidana dengan (Pasal 23 UU No.31 Tahun 1999)
4. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan (Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999)

Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 :

1. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindakan pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal yang lain memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor
2. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

UU NO. 30 TAHUN 2002

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA BAGI KPK

1. Setiap Anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan (Pasal 65 UU No.30 Tahun 2002)

2. Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada KPK yang :
 - a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK tanpa alasan yang sah;
 - b. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada KPK yang bersangkutan;
 - c. Menjabat komisaris atau Direksi suatu Perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi dan jabatan Profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.
(Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2002)
3. Setiap anggota KPK dan pegawai pada KPK yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok (Pasal 67 UU No.30 Tahun 2002)

Pasal 36 UU No.30 Tahun 2002 :

Pimpinan KPK dilarang :

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun;
- b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis harus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dalam anggota KPK yang bersangkutan;
- c. menjabat komisaris atau Direksi suatu perseoran, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan

Profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Pasal 37 UU No.30 Tahun 2002 :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasehat dan pegawai yang bertugas pada KPK.

B.BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk melalui UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TP Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 54 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002).

Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara RI (ayat (2) pasal yang bersangkutan).

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden (ayat (3) pasal yang bersangkutan).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang juga memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan diluar wilayah negara RI oleh Warga Negara Indonesia (Pasal 55 UU No.30 Tahun 2002).

C.PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibagi dalam :

1. Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Peran serta Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme**

Pasal 8 ayat (1) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih

Ayat (2) : Hubungan antara Penyelenggara Negara dengan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

- Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak & kewajiban Penyelenggara Negara.
- Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku.

Pasal 9 Ayat (1) UU No.28 Tahun 1999 :

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN diwujudkan dalam bentuk :

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang Penyelenggara negara;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan

d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

- 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c
- 2) Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku.

Ketentuan tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 9 ayat (3) UU No.28 Tahun 1999).

Pelaksanaan hak-hak tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya (Pasal 9 ayat (2) UU No.28 Tahun 1999).

**Peran serta Masyarakat
dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi

Penjelasan : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 :

Hak-hak masyarakat di dalam berperan serta dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam:

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ;

- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c;
 - 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf e : Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku.

Pasal 41 ayat (3), (4) UU No.31 Tahun 1999 : Masyarakat dalam berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai hak & tanggung jawab yang dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perUUan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. Ayat (5) nya menyatakan : akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 ayat (1), (2) UU No.31 Tahun 1999 :
Pemerintah penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan

tindak pidana korupsi, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

BAB X
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG
PENGADILAN UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

A. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dibentuk menurut UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan : meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 1 butir 3 UU No.30 Tahun 2002 : yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor; penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 butir 1 UU No.30 Tahun 2002 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 butir 2 UU No.30 Tahun 2002 : yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

FUNGSI KPK

Dalam Penjelasan Umum UU NO.30 Tahun 2002 :

1. sebagai penyusun jaringan kerja (*Networking*) yang kuat dalam pemberantasan korupsi;
2. sebagai “*counter partner*” bagi institusi yang telah ada dalam kegiatan pemberantasan korupsi dengan tidak memonopoli tugas dan wewenang Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
3. sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (“*Trigger Mechanism*”)
4. sebagai *superbody* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebab berfungsi melakukan *supervisi* dan dalam keadaan tertentu dapat mengambilalih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

TUGAS KPK melakukan (Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002) :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. *Supervisi* terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e. Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

WEWENANG KPK :

- a. melakukan koordinasi : berwenang
 1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
 5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002).
- b. Melakukan supervisi : berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik (Pasal 8 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002), yang untuk itu berwenang untuk melakukan :
1. mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002)
 2. Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK (Pasal 8 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002)
 3. membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK (Pasal 8 ayat (4) UU No.30 Tahun 2002)
 4. memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (Pasal 10 UU No.30 Tahun 2002)

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK dengan alasan sebagai berikut :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
 2. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-berlarut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
 4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif, atau
 6. keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindakan pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 9 UU No.30 Tahun 2002)
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
1. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara negara;
 2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
 3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002)
- yang untuk itu berwenang untuk :
1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negara;
 3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
 5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 9. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, Penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. (Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002). Disamping itu juga berwenang : melakukan kewenangan-kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam KUHAP (Pasal 38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002) namun tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002).
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, yang untuk itu berwenang :
1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan Penyelenggara negara;
 2. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

3. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 4. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 5. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
 6. melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitoring, yang untuk itu berwenang :
1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
 2. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 3. melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak dipindahkan. (Pasal 14 UU No.30 Tahun 2002)

KEWAJIBAN KPK (PASAL 15 UU NO. 30 TAHUN 2002)

1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK;
4. menegakkan sumpah jabatan;
5. menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

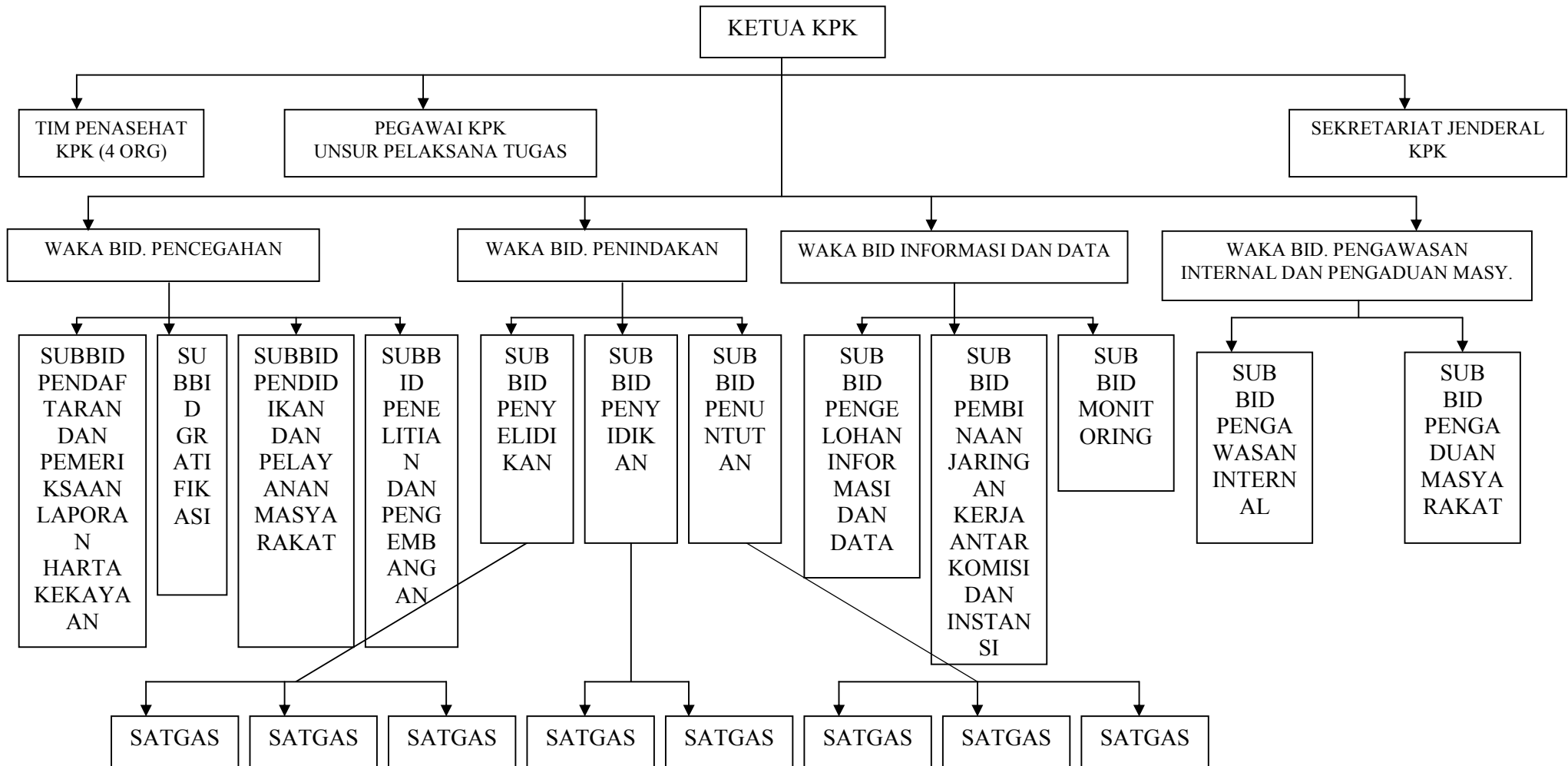
KPK menjalankan tugas & wewenangnya berasaskan pada :

1. kepastian hukum; yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK;
2. Keterbukaan yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. akuntabilitas; yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. kepentingan umum; yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
5. proporsionalitas; yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban KPK.

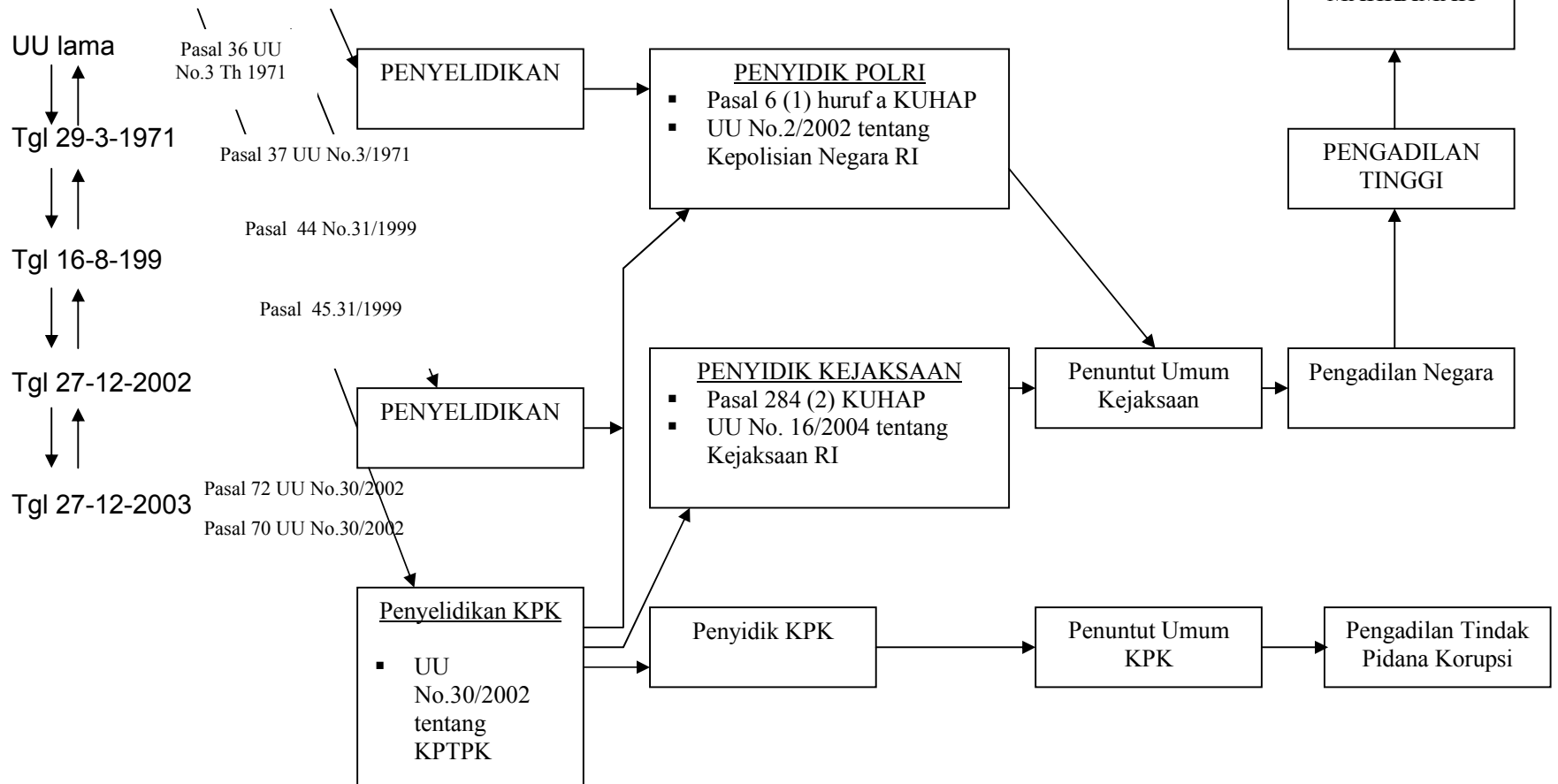
(Penjelasan pasal 5 UU No.30 Tahun 2002).

KPK berkedudukan di ibu kota negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara RI (Pasal 19 ayat (1) UU No., 30 Tahun 2002. KPK dapat membentuk Perwakilan di daerah provinsi (ayat (2) pasal tersebut).

STRUKTUR ORGANISASI



TINDAKAN PIDANA KORUPSI



B. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Penyelidikan

- Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang melaksanakan fungsi Penyelidikan TPK (Pasal 43 ayat (1),(2) UU No.30 Tahun 2002).
- Dalam hal tidak menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan TPK, melaporkan kepada KPK sehingga KPK akan menghentikan Penyelidikan (Pasal 44 ayat (3) UU No.30 Tahun 2002)
- Dalam hal menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan TPK, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut. Penyelidik melaporkan kepada KPK (Pasal 44 ayat (1) UU No.30/2002 :
“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic” (ayat (2) pasal yang bersangkutan).
- Bila KPK berpendapat perkara diteruskan, KPK dapat melaksanakan penyidikan sendiri atau melimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan (ayat (4) pasal yang bersangkutan).

Penyidikan

- Penyidik adalah Penyidik pada KPK yang melaksanakan fungsi penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 45 ayat (1), (2) UU No.30 Tahun 2002)
- Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK (Pasal 39 ayat (2) UU No.30 Tahun 2002)
- KPK dapat melaksanakan kerjasama dalam Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai peraturan perUUan yang berlaku atau

berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui Pemerintah RI (Pasal 41 UU No.30 Tahun 2002).

- KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, penuntutan TPK yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum koneksitas (Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002)
- Terhitung sejak tanggal penetapan sebagai tersangka berlaku prosedur khusus dalam rangka pemeriksaan tersangka berdasar UU No.30 Tahun 2002, namun tidak boleh mengurangi hak-hak tersangka (Pasal 46 ayat (1), (2) UU No.30 Tahun 2002)
- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua PN (Pasal 47 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002).
- Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan pada hari penyitaan yang membuat sekurang-kurangnya :
 1. nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 2. keterangan tepat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
 3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 4. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan;dan
 5. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut (Pasal 47 ayat (3) UU No.30 Tahun 2002). Salinan Berita Acara Penyitaan disampaikan pada tersangka/keluarganya (ayat (4) pasal yang bersangkutan).
- Untuk kepentingan penyidikan, tersangka TPK wajib memberikan keterangan kepada Penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai

hubungan dengan TPK yang dilakukan tersangka (Pasal 48 UU No.30 Tahun 2002)

- Penyidik membuat berita acara penyidikan dan disampaikan kepada Pimpinan KPK untuk segera ditindak lanjuti (Pasal 49 UU No.30 Tahun 2002)
- Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan maka kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan (Pasal 50 ayat (3) UU No.30 Tahun 2002). Dalam hal penyidikan dilakukan bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK maka penyidikan yang dilakukan Kepolisian/Kejaksaan segera dihentikan (ayat (4) pasal yang bersangkutan).

Dalam hal KPK belum melakukan penyidikan dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian/Kejaksaan maka instansi yang bersangkutan harus memberitahu KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan (Pasal 50 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002) yang untuk itu wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK (ayat (2) pasal yang bersangkutan).

Penuntutan

- Penuntut adalah Penuntut Umum pada KPK yang melaksanakan fungsi penuntutan TPK (Pasal 51 ayat (1), (2) UU No.30 Tahun 2002). Penuntut sebagaimana tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum (ayat (3), pasal yang bersangkutan)
- Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima berkas, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negara (Pasal 52 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002). Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari KPK untuk diperiksa dan diputus (ayat (2) pasal yang bersangkutan).

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

- Hakim Pengadilan Tipikor terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc (Pasal 56 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002).
- Pemeriksaan dilakukan majelis hakim berjumlah 5 orang terdiri dari 2 orang hakim PN ybs dan 3 orang hakim ad hoc (Pasal 58 ayat (2) UU No.30 Tahun 2002). Perkara diperiksa dan diputus Pengadilan Tipikor dalam waktu 90 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan TPK (Pasal 58 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002).
- Perkara permohonan banding diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara diterima Pengadilan Tinggi (Pasal 59 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002). Pemeriksaan dengan majelis hakim berjumlah 5 orang terdiri dari 2 orang hakim Pengadilan Tinggi ybs dan 3 orang hakim ad hoc. (ayat (2) pasal ybs).
- Perkara permohonan kasasi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh MA (Pasal 60 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002). Pemeriksaan dengan majelis hakim berjumlah 5 orang terdiri dari 2 orang hakim agung dan 3 orang hakim ad hoc (ayat (2) pasal ybs).

BAB XI

UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. BATASAN DAN RUANG LINGKUP

Skema Munculnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002



Perpu No.1 Th 2002 tentang Pemberantasan TP Terorisme
tdu 18 Okt 2002



Pasal 46 Perpu No.1 Th.2002 : asas retroaktif



Perpu No.2 Th.2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Th.2002
tentang Pemberantasan TP Terorisme Pada Peristiwa
Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

Tdu 18 Oktober 2002



1. UU No.15 Th. 2003 ttg Penetapan Perpu No. 1 Th. 2002 Tentang Pemberantasan TP Terorisme Menjadi UU
2. UU No.16 Th.2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Th. 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Th. 2002 tentang Pemberantasan TP Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU.

Tdu 4 April 2003



PP No. 24 Th. 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi,
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara TP Terorisme tdu
14 April 2003.

UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Instrumen Yuridis :

1. Peraturan Pem. Peng. UU No. 1 Tahun 2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Tgl 18 Oktober 2002) jo UU No.15 Th. 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU (Tgl 4 April 2003)
2. Peraturan Pem. Peng. UU No.2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Tgl 18 Oktober 2003) jo UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU (Tgl. 4 April 2003)
3. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Tgl 14 Mei 2003)
4. Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2002 (Tgl 22 Oktober 2002)
5. Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2002 (Tgl 22 Oktober 2002)

BATASAN-BATASAN

1. Tindak Pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini (Pasal 1 butir ke-1)
2. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 1 butir ke-4)

3. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas. (Pasal 1 butir ke-5)
4. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual ataupun korporasi. (Pasal 1 butir ke-2)
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir ke-3)
6. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Pasal 1 butir ke-9)
7. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau benda tidak bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi termasuk fasilitas internasional (Pasal 1 butir ke-10)
8. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Pasal 1 butir ke-11)
9. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan (Pasal 1 butir ke-12) ... dst

RUANG LINGKUP

Perpu No. 1 Tahun 2002 berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan atau negara lain juga mempunyai yuridiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut (Pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2003)

Yurisdiksi Negara Lain

Negara lain mempunyai yurisdiksi atas pelaku tindak pidana terorisme tersebut diatas, apabila :

1. Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan,
2. Kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan,
3. Kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
4. Kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negara termasuk perwakilan negara asing atau tepat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan di luar negara termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan.
5. Kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
6. Kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan atau
7. Kejahatan dilakukan diatas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan UU negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan (Pasal 3 ayat (2))

Keterangan : harus ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu kecuali Indonesia setuju diberlakukannya asas resiprositas.

Yurisdiksi Negara Indonesia di Negara Asing

Perpu ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan :

1. terhadap warga negara RI di luar wilayah negara RI
2. terhadap fasilitas negara RI diluar negara termasuk tepat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler RI

3. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah RI melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
4. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
5. diatas kapal yang berbendera negara RI atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan UU negara RI pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
6. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara RI (Pasal 4 Perpu No. 1 Tahun 2002).

Ket : pasal ini bertujuan untuk melindungi warga negara RI, perwakilan RI dan harta kekayaan Pemerintah RI di luar negeri

Pasal 5 Perpu No.1 Tahun 2002 : tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik.

Penjelasan :

Bertujuan :

1. agar tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi dan tujuan
2. politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta penghukuman terhadap pelaku.
3. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan pemerintahan negara lain.

Pasal 19 dan Pasal 24 Perpu No.1 Tahun 2002.

Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengesampingkan berlakunya (lebih mengutamakan) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 44 Perpu No.1 Tahun 2002 :

Ketentuan mengenai kewenangan ANKUM (atasan yang berhak menghukum) serta PEPERA (perwira penyerah perkara), dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme.

Pasal 46 Perpu No.1 Tahun 2002 :

Pemberlakuan asas retroaktif dengan menggunakan Perpu/UU (dicabut dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi).

Ketentuan Hukum Acara Pidana

1. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan paling lama 4 bulan. Untuk kepentingan penuntutan, PU berwenang melakukan penahanan paling lama 2 bulan. (Penjelasan Pasal 25 ayat (2) Perpu No.1 Tahun 2002 jo UU No.15 Tahun 2003)
2. Penyidik dapat melakukan penangkapan untuk paling lama 7x24 jam (Pasal 28 Perpu No.1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003)
3. Bukti permulaan yang cukup dapat diperoleh melalui penggunaan setiap laporan intelijen. Penetapan sudah dapat atau diperoleh “bukti permulaan yang cukup” melalui Pengadilan Negeri yang untuk itu harus dilakukan proses pemeriksaan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 hari oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 26 ayat (1), (2), (3) Perpu No.1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003). Bila ditetapkan ada bukti permulaan yang cukup maka Ketua PN memerintahkan dilaksanakannya Penyidikan (Pasal 26 ayat (4) Perpu No.1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003).
4. Alat bukti pemeriksaan perkara TP Terorisme meliputi :
 1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hk. Acara Pidana (KUHP)
 2. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; dan

3. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada :
- a. tulisan, suara atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya (Pasal 27 Perpu No.1 Tahun 2002 jo UU No.15 Tahun 2003).

Penyidik, PU atau Hakim berwenang memerintahkan bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme (Pasal 29 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 2002 jo UU No.15 Tahun 2003).

Penyidik, PU, atau Hakim berwenang meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan tentang harta kekayaan orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 30 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003)

Dalam meminta keterangan tersebut, tidak berlaku ketentuan UU yang mengatur rahasia bank dan rahasia transaksi keuangan lainnya (ayat (2) pasal tsb).

Permintaan keterangan harus diajukan tertulis dengan menyebutkan secara jelas :

- a. nama dan jabatan penyidik, pu atau hakim;
- b. identitas orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan;
- d. tempat harta kekayaan berada (ayat (3) pasal tersebut)

Surat permintaan tersebut harus ditandatangani :

- a. Kapolda atau Pejabat yang setingkat pada Tk. Pusat dalam hal permintaan diajukan Penyidik;
- b. Kajati dalam hal permintaan diajukan PU;
- c. Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan (ayat (4) pasal tersebut)

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik berhak menyadap pembicaraan telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan yang hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua PN untuk jangka waktu paling lama 1 tahun (Pasal 31 ayat (1) huruf b jo ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2003) yang untuk itu tindakan tersebut harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada Atasan Penyidik (ayat (3) pasal tersebut)

Dalam proses penyidikan dan pem. di sid. peng, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor dan lain-lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor yang untuk itu diberitahukan terlebih dahulu larangan tersebut sebelum pemeriksaan dilakukan (Pasal 32 ayat (2), (3) Perpu No. 1 Tahun 2002 jo UU No.15/2003).

B.PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM SERTA KELUARGANYA

Pasal 33 Perpu No.1 Tahun 2002 :

Saksi, Penyidik, PU, Hakim yang memeriksa beserta keluarganya wajib diberi perlindungan dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya : sebelum, selama, sesudah proses pemeriksaan perkara.

Bentuk-bentuk Perlindungan :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental
- b. Kerahasiaan identitas saksi

- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. (Pasal 34 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 2002)

Penjelasan Pasal : *cukup jelas*

Diatur lebih lanjut dalam PP No.24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Batasan :

1. Perlindungan : jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, PU dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 1 angka ke-1 PP No. 24 Tahun 2003)
2. Saksi : orang yang memberi keterangan guna penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara tindak pidana terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri (Pasal 1 angka ke-2 PP No.24 Tahun 2003).
3. Keluarga : Keluarga inti yang terdiri dari suami/isteri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim (Pasal 1 angka ke-3 PP No.24 Tahun 2003).

Permohonan dan Pelaksanaan Perlindungan

Perlindungan wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya TPTerorisme (Pasal 4 ayat (1) PP No.24 Tahun 2003) atau oleh pejabat Kepolisian Negara RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, PU atau Hakim yang bersangkutan (ayat (2) PP No.24 Tahun 2003) atau oleh

pejabat Kepolisian Negara RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang Pengadilan dilaksanakan (ayat (3) PP No. 24 Tahun 2003).

Perlindungan terhadap saksi wajib diberikan oleh Penyidik, PU atau Hakim dalam semua tingkat pem. Perkara (Pasal 5 PP No.24 Tahun 2003). Perlindungan tersebut wajib diberitahukan kepada Saksi, Penyidik, PU atau Hakim dalam waktu 1 hari sebelum perlindungan diberikan (Pasal 6 PP No.24 Tahun 2003).

Bila belum diberikan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat Kepolisian Negara RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, PU atau Hakim (Pasal 7 ayat (2) jo ayat (1) PP No.24 Tahun 2003). Dalam hal diajukan Saksi, tembusan surat permohonan disampaikan kepada Penyidik, PU dan Hakim dalam semua tk. Pem. perkara (ayat (3) PP No.24 Tahun 2003). Perlindungan yang diajukan pada tahap penyidikan berlaku sampai berakhirnya pem. di sidang Peng (Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 03).

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi keluarga (lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) PP No.24 Tahun 2003).

Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak permohonan diterima, Kepolisian Negara RI akan melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan. Teknis pelaksanaan perlindungan diatur lebih lanjut oleh Kapolri (Pasal 8 PP No. 24 Tahun 2003). Biaya dibebankan pada Anggaran Kepolisian Negara RI (Pasal 11 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2003).

Saksi yang didatangkan dari luar negeri, perlindungan dilakukan dengan kerjasama dengan pejabat Kepolisian negara yang bersangkutan (Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2003).

Pemberian Perlindungan dihentikan

dalam hal :

1. berdasarkan penilaian Kepolisian, tidak diperlukan lagi atau

2. atas permohonan yang bersangkutan (Pasal 9 ayat (1) PP No.24 Tahun 2003)

Penghentian pemberian perlindungan atas dasar Pasal 9 ayat (1) huruf a PP No.24 Tahun 2003 harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, PU dan atau Hakim dalam waktu paling lambat 3 hari sebelum perlindungan dihentikan (Pasal 9 ayat (2) PP No.24 Tahun 2003).

C. KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI

Kompensasi

Korban atau ahli waris berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi (Pasal 36 ayat (1) UU Pemberantasan TP Terorisme).

Penjelasan : Kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil.

Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 36 ayat (2) UU PTP Terorisme).

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 36 ayat (3) UU PTP Terorisme)

Kompensasi dan/atau restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan Pengadilan (Pasal 36 ayat (4) UU PTP Terorisme)

Kompensasi diajukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan (Pasal 38 ayat (1) UU PTP Terorisme).

Restitusi diajukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga (Pasal 38 ayat (2) UU PTP Terorisme).

Menteri Keuangan dan Pelaku memberikan kompensasi dan/atau restitusi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan (Pasal 39 UU PTP Terorisme).

MenKeu, Pelaku atau Pihak Ketiga melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada Ketua Pengadilan yang memutus

perkara disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi (Pasal 40 ayat (1) UU PTP Terorisme).

Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 40 ayat (2)).

Ketua Pengadilan setelah menerima tanda bukti akan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada Papan Pengumuman Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 40 ayat (3)).

Pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaannya dilaporkan kepada Pengadilan (Pasal 42 UU Pemberantasan TP Terorisme).

Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan (Pasal 41 ayat (1) UU PTP Terorisme). Pengadilan segera memerintahkan Menteri Keuangan, Pelaku atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima (Pasal 41 ayat (2) UU PTP Terorisme).

Rehabilitasi

Tiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah BHT (Pasal 37 ayat (1) UU PTP Terorisme).

Penjelasan Pasal 37 UU PTP Terorisme :

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya : kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus didalam putusan Pengadilan sebagian dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) di atas (Pasal 37 ayat (2) UU PTP Terorisme).

Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh Korban Kepada Menteri Kehakiman & HAM (Pasal 38 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Rangkuman Jenis TP dalam UU PTP Terorisme:

**TINDAKAN PIDANA DALAM
UU PEMBERANTASAN TP TERORISME**

❖ Tindak Pidana Terorisme :

1. Pasal 6

2. Pasal 7

3. Pasal 8 jo Pasal 6 :

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a. | g. | m. |
| b. | h. | n. |
| c. | i. | o. |
| d. | j. | p. |
| e. | k. | q. |
| f. | l. | r. |

4. Pasal 9

5. Pasal 10 jo Pasal 6

6. Pasal 11 jo Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10

7. Pasal 12 :

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a. | c. | e. |
| b. | d. | f. |
| | | g. |

8. Pasal 13 : dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara :

- a.
- b.
- c.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anonymus, Tanpa Tahun, *KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Karya Anda.
- Anonymus, 2007, *KUHAP Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baskoro, Bambang Dwi, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Moeljatno, 2001, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP*, Bogor: Politeia.
- Saleh, K. Wantjik, 1985, *Pelengkap KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarto, Suryono, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1970 dan telah dirubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.